



KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

**SURAT KETERANGAN TERDAFTAR**

Nomor : 1305-00-00/046/VII/2024

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Ormas, serta Surat Permohonan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pekalongan nomor 200.1.4.11, tanggal 21 Juni 2024, perihal Permohonan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) PPDI setelah diadakan penelitian kelengkapan dokumen/berkas, dengan ini Kementerian Dalam Negeri, menyatakan bahwa:

Nama Organisasi : **PERSATUAN PERANGKAT DESA INDONESIA (PPDI);**  
Tanggal Berdiri : **17 Juni 2006 ;**  
Bidang Kegiatan : **KETENAGAKERJAAN, LAINNYA ;**  
NPWP : **81.888.911.5-629.000 ;**  
Alamat : Desa Bondansari RT. 006 RW. 003, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah.

Telah terdaftar sebagai Organisasi Kemasyarakatan, dan Surat Keterangan Terdaftar ini berlaku 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani.

Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, kesalahan, penyimpangan, penyalahgunaan, dan pelanggaran hukum, akan dilakukan perbaikan dan/atau pencabutan sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 2 Juli 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh:

a.n. Menteri Dalam Negeri  
Direktur Jenderal  
Politik dan Pemerintahan Umum  
u.b.

Sekretaris Direktorat Jenderal,

Dr. Drs. Imran, M.Si, MA  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19731026 199302 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :  
1. Menteri Dalam Negeri (sebagai laporan);  
2. Gubernur Jawa Tengah;  
3. Bupati Pekalongan;  
4. Arsip.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E sehingga tidak diperlukan tanda tangan dengan stempel basah.



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAMPIRAN SURAT KETERANGAN TERDAFTAR**

Nomor : 1305-00-00/046/VII/2024

Susunan Kepengurusan Organisasi

No.	Nama	Jabatan	Masa Bakti Kepengurusan
1	Moh. Tahril	Ketua (atau sebutan lain)	2022-2027
2	Soedjoko	Sekretaris (atau sebutan lain)	2022-2027
3	Ambo Asse	Bendahara (atau sebutan lain)	2022-2027

Surat Keterangan Terdaftar (SKT) ditembuskan kepada Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai wilayah kerja Ormas, oleh Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik yang mengajukan.